

PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

(studi pada Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)

SKRIPSI



oleh :

Kanisia Harling Narsoni

2018120166

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI MALANG

TAHUN AJARAN 2021/2022

## RINGKASAN

Terbentuknya Undang-undang yang tertuang dalam No.32 Tahun 2004 yang tepatnya pada pasal 1 (5) menjelaskan mengenai otonomi daerah merupakan kewenangan untuk dapat mengatur daerahnya sendiri dan menjalankan kepentingan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pada amanat undang-undang.

Dengan adanya UU Nomor 6/2014 yang mengatur mengenai desa, kebijakan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah desa untuk mengelola sendiri wilayah desanya. Dengan terbitnya peraturan para Menteri dalam Negeri yang tertuang pada No.13 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah desa untuk berpegang teguh pada Norma dan aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) (Wardani 2013) APBDes ialah Rencana yang disusun setiap tahun yang telah ditetapkan disepakati oleh pihak pemerintah desa untuk kemudian dikelola dalam rangka pembangunan desa dan upaya mensejahterakan warga desa (Rujiman 2014). APBDes memiliki komposisi berkaitan dengan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah desa serta anggaran untuk pembelanjaan kepentingan pembangunan desa (Lapananda, 2016:25).

Seharusnya semua dana yang telah disalurkan ke desa harus digunakan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan bukan hanya berfokus pada pengelolaan pembangunan di desa, namun penting pula untuk dipergunakan dalam memberdayakan warga desa karena dengan demikian dana yang disalurkan dapat menjadi Perangsang/Motivasi bagi pemerintah desa dalam membiayai semua program yang telah ditetapkan oleh desa. Melihat situasi yang terjadi tersebut penulis sangat tertarik untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian yaitu “PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”.

Berdasarkan pada temuan yang didapatkan, peneliti menyimpulkan Kemampuan Keuangan Daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa Pandanlandung secara otonom dinyatakan cukup tinggi dan sudah sesuai dengan perencanaan .dimana ditetapkan Tahun 2019 sebanyak 64,91%,Tahun 2020 sebanyak 51,325% dan Tahun 2021 sebanyak 65,43% hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kemampuan keuangan

daerah dalam memperoleh pendapatan maka sangat mendukung kelancaran Pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan jumlah untuk pembangunan desa.

***Kata kunci :Keuangan Daerah,Otonomi Daerah ,dan Pemerintah Desa***

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Menurut Undang –Undang yang tertuang pada Nomor 32 Tahun 2004 yang tepatnya pada pasal 1 (5) menjelaskan mengenai otonomi daerah merupakan kewenangan untuk dapat mengatur daerahnya sendiri dan menjalankan kepentingan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pada amanat undang-undang. Terciptanya UU No.32 Tahun 2004 tersebut maka tanggung jawab serta peranan pemerintah daerah sangat besar karena dengan peranan pemerintah daerah memberikan pengaruh serta sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah Meskipun terdapat perbedaan seperti tidak siapnya pemerintah daerah pada masing-masing sektor dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemandirian dalam mengelola daerahnya masing-masing diyakini dapat menjadi garda terdepan serta strategi yang optimal untuk membangun desa secara maksimal karena dengan menggunakan sistem ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan daerahnya dengan bekerja sama dengan berbagai sektor yang dinilai lebih maksimal hasilnya daripada hanya dikerjakan oleh beberapa pihak saja.

Selain itu Otonomi Daerah merupakan salah satu langkah pertama dalam membangun ekonomi nasional yang memiliki daya saing serta berkontribusi signifikan pada pertumbuhan nasional yang dapat membantu masyarakat daerah mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Otonomi merupakan kewenangan dalam mengelola serta mengatur wilayahnya sendiri untuk penyelenggaraan kepentingan daerahnya yang bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya (Adisubrata,2003).

Ciri-ciri sebuah daerah mampu untuk mengelola secara mandiri wilayahnya berdasarkan pada Yuliati (2001) ialah dapat dinilai dengan kemampuan keuangan daerahnya dengan demikian dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga dapat memperkecil atau mengurangi proporsi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta mampu untuk menghasilkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki di daerah tersebut baik yang berupa alam maupun manusianya.

Terciptanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur mengenai desa, kebijakan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah desa untuk mengelola sendiri

wilayah desanya. Bentuk dari dilaksanakannya program otonomi daerah ini ialah memberikan anggaran kepada desa dari pemerintah pusat yang bertujuan dalam peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat desa.

Diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri yang tertuang pada Nomor 113/2004 yang mengatur mengenai pengelolaan anggaran desa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keuangan di desa. Maka dana yang dikelola oleh pihak desa merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan terhadap pembangunan desa, melakukan tata usaha, menyusun laporan serta mempertanggung jawabkan laporan penggunaan dana desa kepada yang berwenang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Wardani 2013 )APBDes ialah Rencana tahunan yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah desa yang kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan pembangunan serta untuk memberdayakan warga desa (Rujiman 2014). APBDes memiliki komposisi berkaitan dengan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah desa serta anggaran untuk pembelanjaan kepentingan pembangunan desa (Lapananda, 2016:25).

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ,di Desa Pandanlandung ternyata masih terdapat beberapa gambaran permasalahan yang harus dihadapi dan perlu penanganan. melihat situasi yang terjadi di desa Pandanlandung penjarangan permasalahan diperoleh di setiap Dusun seperti di bidang pemerintahan dan kelembagaan dimana seluruh kegiatan tingkat PKK kurang maksimal,Koordinasi tingkat desa masih kurang karena itu sangat dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan PKK mulai tingkat RT sampai Desa.Selain itu di bidang lingkungan hidup belum ada tempat pengolahan sampah sehingga sampah belum bisa dikelola karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembuangan sampah ke selokan dan sungai.

Seharusnya semua dana yang telah disalurkan ke desa harus digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bukan hanya untuk pembangunan desa tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat desa.Karena dengan demikian dana yang disalurkan dapat menjadi perangsang/Motivasi bagi pemerintah desa dalam membiayai semua program yang telah ditetapkan oleh desa.melihat situasi yang terjadi tersebut penulis sangat tertarik untuk menganalisis “PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (studi pada Desa Pandanlandung,Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang)”.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan kemampuan keuangan daerah di Desa Pandanlandung dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Periode Tahun 2019-2021)
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perencanaan anggaran keuangan di Desa Pandanlandung periode Tahun (2019-2021)

## 3. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari dilakukannya riset ini:

1. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Desa Pandanlandung periode tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perencanaan anggaran keuangan (2019-2021)

## 4. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam hasil penelitian ini:

1. Untuk bahan referensi penulisan bagi semua pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya penelitian yang sejenis dengan permasalahan yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan sehingga meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Manajemen keuangan.
3. Temuan yang didapatkan diharap mampu untuk digunakan dalam pertimbangan dibuatnya sebuah kebijakan yang memiliki kaitan pada PAD dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan pembangunan di desa.
4. Hasil temuan yang didapatkan diharap mampu untuk dipergunakan oleh pihak penyelenggara pemerintah desa untuk melakukan pelayanan prima demi ketercapaian kepentingan warga desa.

## DAFTAR PUSTAKA

P Adi, H. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa–Bali). *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 21(1), 1-19.

Alting, U. P. (2018). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).

Anggun Ciptasari Nurana, L. M. (2000). Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Kepentingan Perkembangan Wilayah Di Kawasan Ciayumajakuning.

Aziz, N. L. ((2016)). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.

Bella, R. (2002.). Potensi Objek Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Kota.

Efendi, D. &. ((2011)). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk. *In Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, (Vol. 1, No. 1).

Hidayat, M. H. ( (2016).). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. . *Jurnal Sungkai*, 4(2), 36-55.

Ismanuddin, M. (2009). Pelaksanaan Otonomi Daerah Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu.

Kajual, J. E. (2004). Kebijakan Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 1-10.

Laedy Tamboto, J. M. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Etonomi Daerahpada Kabupaten Minahasa Tenggara.

Liando, L. Y. ((2017).). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. . *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Mamangkey, K. K. ((2020)). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014-2018. . *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 10-22.

Muin, F. (2014, Januari-Maret). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Keuangan Daerah. *Fiat Justisiajurnal Ilmu Hukum Volume 8 No .1*, 69-79.

Muta\*Ali, L. (2000.). Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Kepentingan Perkembangan Wilayah Dikawasan Ciayumaja.

Nurcholis, H. (2014). Pemerintahan Desa. *Politica Vol. 5 No. 1 Juni*, 79-92.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang. *Jurnal Usm Law Review Vol 2 No 2*, 210-226.

Radjikan, D. J. (2021, Juli). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembinaan Desa. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.1 No.2, Juni*, 14-19.

Rosmini, R. ( (2021)). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa . (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*).

S.B, M. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gpwa . *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar*, 1-91.

Saputra, K. A. ((2019)). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5-13.

Siti, K. &. ((2017). ). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. . *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.

Tamboto, L. M. ((2014)). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).

Wahyuni, S. (2008). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wulandari., A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. *Vol.5 No.2*.